

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA

Diding Bajuri<sup>1</sup>, Deni Herdiana<sup>2</sup>, Suci Hotimah<sup>3</sup>

Universitas Majalengka

[didingbajuri@unma.ac.id](mailto:didingbajuri@unma.ac.id), [deni.herdiana@unma.ac.id](mailto:deni.herdiana@unma.ac.id), [sucihotimah@gmail.com](mailto:sucihotimah@gmail.com)

### ABSTRACT

*The research method used in this study is a qualitative research method, through informants that the author has determined with the analytical tools used from Meter and Horn in Nugroho, 2009, namely: (1) Interorganizational Communication, (2) Executor Characteristics, (3) Economic Conditions, Social and Political, (4) Executor's Disposition or Attitude.*

*Through the informants that the author has determined regarding the implementation of the BPNT Program in Cikijing District, Majalengka Regency, in general it is running according to the goals and targets set, obstacles in implementing BPNT can be overcome by paying attention to the General Guidelines (Pedum) that have been prepared.*

*Keywords : Implementation, Bantuan Pangan Non Tunai, Non-Cash Food Assistance Program (BPNT)*

### PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai Negara termasuk negara ini, dan kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan, dan perlu dicarikan perspektif yang baru atau yang berbeda untuk melihat, menafsirkan, dan memaknai apa yang dinamakan dengan kemiskinan. Kemiskinan Indonesia yang multidimensional ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik, dan budaya, kemiskinan dalam segala dimensi yang ada baik pendidikan, sejarah, kemiskinan dalam dimensi sosiol-politik (wacana), kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam dimensi

perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi).

Proses pembangunan di Indonesia dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi *makro* yang menggambarkan bagaimana perubahan suatu masyarakat dipengaruhi oleh institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya, sedangkan yang kedua adalah dimensi *mikro* yaitu proses pembangunan yang terjadi dipengaruhi oleh individu dan kelompok masyarakat itu sendiri (Adi, 2003).

Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan terbagi dalam dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural dimaknai sebagai akibat dari adanya karakter budaya dan etos kerja masyarakat yang lemah, sementara kemiskinan secara Struktural dimaknai bahwa timbulnya kemiskinan

diakibatkan dari adanya kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyat miskin, atau lebih mementingkan golongan kaya (pengusaha).

Sedangkan disisi lain, masyarakat sebagai individu atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi perubahan itu sendiri memerlukan keterbukaan budaya maupun peningkatan etos kerja yang selaras dan terarah (mikro-kultural).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Pada tahun 2018-2020 jumlah penduduk miskin di

Indonesia sebesar 25,14 juta atau 9,66% dari total penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia. Angka ini mengalami penurunan menjadi 24,79 juta orang atau kemiskinan di Indonesia. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Majalengka pada tahun 2013- 2017, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Majalengka (Tahun, Ribu Jiwa)**

No.	Tahun	Jumlah	Ket.
1	2016	152.5	
2	2017	150.3	
3	2018	129.3	
4	2019	121.1	
5	2020	138.2	

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, 2022*

Selanjutnya dapat penulis uraikan keadaan penduduk Kecamatan Cikijing berdasarkan data luas daerah, rumah tangga, jumlah penduduk dan tingkat

kepadatan penduduk di Kecamatan Cikijing kabupaten Majalengka berdasarkan data tahun 2020 sebagaimana tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2. Data Luas Daerah, Rumah Tangga, Jumlah Penduduk dan Kepadatan di Kecamatan Cikijing Tahun 2020**

No.	Nama Desa	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Rumah Tangga	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
				Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Cisoka	4,15	701	1.035	1.014	2.049	494
2	Sindangpanji	3,50	1.436	2.687	2.744	5.431	1.552
3	Cikijing	3,00	1.320	4.651	4.524	9.175	3.058
4	Cidulang	2,15	1.943	3.515	3.480	6.995	3.253
5	Sukamukti	1,55	1.367	2.379	1.940	4.319	2.786
6	Kasturi	2,00	1.272	2.585	2.595	5.180	2.590
7	Banjaransari	2,05	1.877	3.304	2.960	6.264	3.056

No.	Nama Desa	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Rumah Tangga	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
				Laki-Laki	Perempuan	Total	
8	Sindang	3,45	1.785	3.195	3.010	6.205	1.799
9	Sukasari	2,30	1.468	2.683	2.643	5.326	2.316
10	Sunalari	1,60	553	829	800	1.629	1.018
11	Bagjasari	2,05	1.045	1.857	1.813	3.670	1.790
12	Jagasari	5,70	1.622	2.736	2.744	5.480	961
13	Cilancang	1,99	365	722	761	1.483	745
14	Kancana	4,60	876	1.199	1.237	2.436	530
15	Cipulus	3,45	928	1.376	1.218	2.594	752
<b>Jumlah</b>		<b>43,54</b>	<b>18.558</b>	<b>34.753</b>	<b>33.483</b>	<b>68.236</b>	<b>1.567</b>

Sumber : Kantor Kecamatan Cikijing Tahun 2022

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Negara lain BPNT dikenal dengan

istilah *Non Cash Food Assistance Program*. BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin.

Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2020 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras 15 Kg/KK/bulan dengan harga Rp 1.600,- per kg.

Distribusi atau penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 200.000/KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli

kebutuhan bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut e-Warung.

Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diselenggarakan sesuai dengan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Salah satu tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi

seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan dan disalurkan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai.

Kabupaten Majalengka Tahun 2020 menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebanyak 101.396 KPM, sementara untuk Kecamatan Cikijing memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 4.579 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3. Data Agregat KPM BPNT Kabupaten Majalengka

No.	Kecamatan	Jumlah	Ket.
1.	2.	3.	4.
1	Bantarujeg	5234	
2	Dawuan	3318	
3	Banjaran	2035	
4	Cigasong	2616	
5	Jatiwangi	6443	
6	Kadipaten	3339	
7	Panyingkiran	2181	
8	Lemahsugih	7636	
<b>9</b>	<b>Cikijing</b>	<b>4579</b>	<b>Obyek Pen.</b>
10	Maja	4325	
11	Leuwimunding	4405	
12	Sumberjaya	4284	
13	Cingambul	4665	
14	Kertajati	2637	
15	Ligung	3648	
16	Majalengka	4216	
17	Palasah	3692	
18	Rajagaluh	2729	
19	Talaga	3680	
20	Argapura	3126	

21	Jatitujuh	2774	
22	Sindang	1750	
23	Sindangwangi	3033	
24	Sukahaji	2954	
25	Kasokandel	4054	
26	Malasma	6682	
<b>JUMLAH KPM</b>		<b>100.035</b>	

BPS Kabupaten Majalengka, tahun 2022

Bantuan pangan berupa non tunai ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait program subsidi beras sejahtera (rastra). “Jika dulu bantuannya dalam bentuk beras langsung yang dikirim oleh bulog, maka sekarang diubah dengan bantuan non tunai agar lebih tertata. Sekarang diberikan melalui rekening dengan nilai bantuan Rp. 200.000 setiap bulannya.”. Nilai bantuan tersebut tidak bisa diuangkan, namun ditukar dengan beras atau telur melalui e-Warung atau agen yang telah disediakan yang bekerjasama dengan Bank BRI. Saat ini telah tersedia 22 agen (e-warung) yang tersebar di 15 desa se Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Caranya cukup mudah, bawa kartu ATM dan berikan kepada e-Warung. Nanti saldo akan dicek dan langsung bisa diberikan beras atau telur. Selain itu akan ada struk sehingga dapat diketahui nilai pembelanjaan. Karena itu, dengan adanya BPNT ini bisa memaksimalkan kualitas penerima manfaat, dan bisa berjalan dengan aman kondusif, serta membawa masyarakat Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka lebih sejahtera di masa yang akan datang.

Peraturan menteri tersebut menciptakan sebuah inovasi atau program baru untuk program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah

bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan e-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) dan RPK (Rumah Pangan Kita) yang bekerjasama dengan Bank Penyalur (Pedoman Pelaksanaan BPNT, 2018).

Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Pada tahun 2020 nilai bantuan BPNT yang semula Rp. 110.000.- per KPM setiap bulannya naik menjadi Rp. 200.000.- per KPM perbulan (Kemensos RI, 2020). Dengan adanya Pandemi Covid-19, pada bulan April 2020 Pemerintah Kabupaten Majalengka menyalurkan Bansos bagi keluarga kurang mampu termasuk mereka yang terdampak penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Upaya ini sebagai

bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi ketahanan pangan masyarakat, terutama pada keluarga rentan selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan masuk ketahap pelaksanaan berdasarkan data Jaring Pengaman Sosial Covid-19 Kabupaten Majalengka, bantuan sembako yang disalurkan dari berbagai program sosial pemerintah pusat hingga kabupaten. Untuk program BPNT sendiri mengalami penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khusus dalam masa Pandemi Covid-19 ini yang disebut BPNT Covid-19.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, adalah suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Penelitian dilaksanakan selama 2-3 (dua) bulan. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut, untuk mengetahui dampak positifnya kepada penerima bantuan pangan non tunai di Kecamatan Cikijing yaitu sebanyak 5.940 KPM kepala keluarga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Sumber data dalam penelitian ini dijangkau dari sumber sekunder dan primer dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data primer, adalah data yang didapat dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang betul-betul mengetahui tentang bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.
2. Data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji, data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

Metode dalam mengambil informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, artinya teknik penentuan sumber data dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representative sesuai kriteria yang relevan dengan fenomena penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.



Tabel Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Pekerjaan/Jabatan
1.	Drs. H. Nana Sukarna, M.Si.	Camat Kec. Cikijing
2.	Mila Oktalina Elia, SE. NIP. 19781016 201406 2 001	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.	Hj. Wiwi Wiyarsih, S.Sos., M.Si. NIP. 19640504 198603 2 012	Kasi Kesejahteraan Sosial
4.	Andri	TKSK Kec. Cikijing
5.	Anis Nurilahi	Pemilik e-Warong Cikijing
6.	Ibu Rina Marlina (Desa Bagjasari)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
7.	Bapak Maman (Desa Cipulus)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
8.	Bapak Adhur (Desa Cidulang)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
9.	Ibu Neni (Desa Sunalari)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
10.	Bapak Jaja (Desa Cisoka)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Cikijing Tahun 2022

### Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yakni melalui :

#### 1. Observasi

Observasi yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sebuah objek penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung dilapangan sehingga memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### 2. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang terkait. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu dengan yang lainnya.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di atas. Kegiatan yang

dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

### Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif. Menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif; Pertama, Reduksi Data yaitu cara memilih, menfokuskan, dan menyederhanakan informasi dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip dan sebagainya, sedangkan untuk proses mempertegas, mempersingkat, menghilangkan yang tidak perlu, memilih fokus, dan menyusun data sehingga kesimpulan bisa dibuat; Kedua, Penyajian data yaitu seperti menyusun data dan mempersentasikan data dengan baik agar

lebih mudah untuk dipahami. Penyajian bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, tabel dan seterusnya; Ketiga, Menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi yaitu proses penarikan kesimpulan awal masih belum kuat, terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah penghimpunan data berakhir.

### Keabsahan Data

Semua data yang diperoleh dan yang ditemukan dalam penelitian ini akan diuji kredibilitasnya dengan cara triangulasi. Menurut Sugiyono (2016), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik diartikan sebagai pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengontrol data pada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dicocokkan dengan hasil observasi dan dokumen.

Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut masih menimbulkan hasil data yang berbeda-

beda, maka peneliti akan melakukan diskusi yang lebih mendalam dengan sumber data yang berkaitan atau yang lain guna memastikan data yang dianggap benar atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda.

#### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan dengan wawancara, observasi, atau cara lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji memunculkan data yang berbeda, maka akan dilakukan tes secara berulang-ulang sehingga didapatkan kepastian datanya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. HASIL PENELITIAN

Sebagaimana diketahui bahwa penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015. DT-PFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data, yang dibentuk melalui Surat Keputusan



Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016. Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non Tunai 2017 ditetapkan oleh Menteri Sosial. KPM

BPNT 2017 adalah keluarga yang namanya termasuk di dalam DPM. DPM diserahkan kepada Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Sosial. Bank Penyalur kemudian membukakan Rumah Rekening berdasarkan DPM. Rumah Rekening akan berubah menjadi Akun Elektronik Bantuan Pangan setelah proses pendaftaran peserta selesai. Apabila KPM yang namanya terdaftar dalam DPM telah memiliki rekening, maka dapat digunakan untuk menerima Program BPNT.

Tabel jumlah KPM di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka

No.	Desa	Jumlah KPM
1	Bagjasari	312
2	Banjaransari	444
3	Cidulang	339
4	Cikijing	330
5	Cilancang	222
6	Cipulus	157
7	Cisoka	297
8	Jagasari	349
9	Kancana	168
10	Kasturi	432
11	Sindang	312
12	Sindangpanji	366
13	Sukamukti	350
14	Sukasari	378
15	Sunalari	123
		4579

Kantor Kecamatan Cikijing tahun 2022

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka telah dilakukan pendistribusian Kartu Kombo sejak bulan oktober tahun 2018 oleh BRI sebagai Bank Penyalur yang ditunjuk oleh di Mentri Sosial di Kabupaten Majalengka dan terdapat data tambahan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimasa Pandemi Covid-19 ini.

Keikutsertaan Kecamatan Cikijing dalam melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didasari dengan banyaknya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Majalengka merupakan sebuah bentuk keprihatian pemerintah baik dari pemerintah setempat, pemerintah daerah, maupun pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan

dalam kehidupannya sehari-hari. Kecamatan Cikijing dengan jumlah KPM sebanyak 4579 orang, pemerintah Kecamatan Cikijing berkoordinasi dengan Tim Kordinasi Bansos Kabupaten Majalengka untuk melakukan penyaluran Kartu KKS dengan 2 tahap agar semua KPM mendapatkan tersebut.

Selanjutnya, untuk pencarian saldo yang ada di rekening setiap KPM dilakukan di e-Warung yang ditetapkan oleh bank penyalur (BRI). e-Warung adalah Elektronik Warung Gotong Royong yang dibentuk oleh Kelompok Usaha Bersama (Kube) Program Keluarga Harapan (PKH). e-Warung merupakan suatu bentuk usaha ekonomi produktif KPM. Bank Penyalur (BRI) mengidentifikasi agen bank, pedagang, dan/pihak lain untuk menjadi e-warung penyalur BPNT. Penetapan e-Warung sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur (BRI) dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar dapat menjadi e-Warung adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank Penyalur (BRI).
- 2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya
- 3) Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM.
- 4) Menjual beras dan/atau telur sesuai harga pasar.

- 5) Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- 6) Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lansia (Lanjut Usia) dan KPM Disabilitas

Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Penyalur (BRI) untuk menetapkan sebuah e-Warung, ini membuktikan bahwa implementasi Program BPNT akan berjalan lancar dan mudah dipantau oleh pihak Bank Penyalur (BRI) agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat penyaluran Program BPNT.

Adapun jumlah e-Warung yang dipersiapkan untuk proses penyaluran Program BPNT di Kecamatan Cikijing sebanyak 22 unit yang tersebar di 15 desa, jumlah e-Warung tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah desa yang ada di Kecamatan Cikijing. E-Warung merupakan toko/pedagang yang direkomendasikan oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan oleh BRI dan sebagai tempat transaksi penyaluran Program BPNT. Seseorang yang memiliki dan mengelola sebuah e-Warung disebut sebagai Agen Bank, dalam hal ini adalah Agen BRI Selain itu, untuk tugas dan fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping BPNT di setiap desa adalah memberikan sosialisasi kepada kepada KPM mengenai Program BPNT dan menyiapkan data KPM, serta mengkoordinasikan tempat dan waktu pencairan BPNT kepada KPM setiap bulannya agar pelaksanaan penyaluran dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari Program BPNT.

Untuk melihat Implementasi Program BPNT disalurkan kepada KPM di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, maka peneliti mengangkat

beberapa indikator menurut Meter dan Horn (Nugroho, 2009) yaitu Komunikasi Interorganisasional, Karakteristik Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik serta Disposisi atau Sikap Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut :

### 1. Komunikasi Interorganisasional

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disebarkan dengan jelas, akurat dan konsisten serta tidak menimbulkan kontradiksi. Berdasarkan Pedoman Umum BPNT bahwa sosialisasi dan komunikasi Program BPNT dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksana di pusat dan daerah, kalangan media, LSM, akademisi dan masyarakat, termasuk Peserta/KPM BPNT, terutama di daerah yang sedang menjalankan Program BPNT. Tersosialisasikannya BPNT kepada semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci kesuksesan BPNT. Untuk itu disusun strategi komunikasi dan sosialisasi BPNT yang komprehensif. Strategi komunikasi dan sosialisasi ini tidak hanya memfokuskan pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan program BPNT, tetapi juga aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam membangun dukungan dan komitmen untuk melembagakan Program BPNT dalam bentuk Sistem Jaminan Sosial. Berikut pandangan pemahaman mengenai Program BPNT yang diketahui oleh

informan yang mewakili semua stakeholders pelaksanaan BPNT di Kecamatan Cikijing. Komunikasi mengenai Program BPNT yang disosialisasikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kabupaten di Kecamatan Cikijing sudah dilaksanakan, berikut kutipan wawancara dengan Camat Kecamatan Cikijing, yang mengatakan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan tentang Program BPNT kepada masyarakat :  
*“Iya, kami pihak pemerintah kecamatan pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyaluran BPNT dengan pihak Tenaga TKSK Kecamatan Cikijing dengan dan dihadiri pihak pemerintah desa yang ada di Kecamatan Cikijing”*

(Hasil wawancara dengan Camat pada tanggal 9 September 2022)

Selanjutnya pandangan pegawai lainnya yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cikijing, menurutnya BPNT telah disosialisasikan kepada masyarakat dan dihadiri pihak desa dan Tim Koordinator Bansos, berikut kutipan wawancaranya:

*“Sosialisasi Program ini pernah dilakukan kepada masyarakat, dan dihadiri pihak desa, dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial”*

(Hasil wawancara dengan Kasi Kesos pada tanggal 12 Agustus 2022).

Penjelasan Camat tersebut di atas dibenarkan oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Kasi Kesos) Kecamatan Cikijing, sebelum penggantian Rastra menjadi BPNT dilakukan sosialisasi dan diikuti oleh pihak kecamatan dan

pihak lainnya. Berikut Wawancaranya :

*“Jadi sebelum berakhir Rastra itu dan sebelum masuk BPNT, itu ada sosialisasi/komunikasi dulu, seperti apa model BPNT, apa itu BPNT, itu disosialisasikan dengan mengundang camat kemudian dari kepolisian, kemudian dari desa, kemudian teman-teman penyuluh sosial kecamatan dan TKSK, kita diundang semua untuk menerima sosialisasi yang dilaksanakan dan disampaikan dari Dinas Sosial”.*

(Hasil wawancara dengan Kasi Kesos pada tanggal 5 September 2022).

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa pihak kecamatan dengan unsur-unsur yang terkait, misalnya TKSK, para agen (pemilik E-Warung, Para Kepala Desa, KPM serta Babinsa dan babinkamtibmas selalu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa untuk penyampaian pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu dilakukan pada saat tanggal sekian ketika saldo sudah masuk di rekening KPM, penyampaian ini mulai dari Bank Penyalur kepada Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial Menyampaikan kepada TKSK, selanjutnya kepada Agen. Berikut Wawancaranya yang dilakukan dengan TKSK sekaligus pendamping BPNT di Kecamatan Cikijing :

*“Nanti pada saat tanggal sekian ketika saldonya sudah masuk di Kartu KKS nya, di Kartu ATM nya itu, maka diinformasikan kepada seluruh KPM untuk datang di Agen yang telah ditentukan. Dan penyampainya itu*

*pertama memang menyurat, pihak BRI menyurat ke TIKOR Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Dinas Sosial menyampaikan kepada teman-teman TKSK kemudian ke Agen. Biasanya Agen juga lebih cepat karena Agen punya mesin EDC. Justru Agen juga sekarang biasa heran karena masyarakat lebih cepat tau bahwa sudah ada saldo yang masuk. Mereka juga walaupun hari ini rekeningnya sudah masuk saldonya itu hari juga kalau dia mau gesek atau belanja di e- Warung ya itu bisa dia belanjakan”*

(Hasil wawancara dengan TKSK pada tanggal 16 Agustus 2022).

Pandangan tersebut di atas juga dibenarkan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cikijing. Menurutnya sosialisasi tentang Program BPNT kepada pihak-pihak yang terkait serta masyarakat itu telah dilakukan oleh pendamping BPNT. Berikut kutipan wawancaranya :

*“Penyampaian tentang BPNT ini dilakukan oleh pihak Kecamatan bersama dengan TKSK dan pendamping setiap desa kemudian kami terkait dengan berbagai hal mengenai penyaluran BPNT, misalnya mempersiapkan bahan pangan yang siap dibeli oleh KPM.*

*Sosialisasi ini dilakukan agar komunikasinya berjalan bagus, kan pertama koordinasi itu dari kecamatan, nanti kalau sudah masuk saldonya itu nanti kita cek saldonya itu. Kalau sudah masuk saldonya kita hubungi KPM baru kita laporkan jadwalkan bilang tanggal sekian”*

(Hasil wawancara dengan agen BRI pada tanggal 8 September 2022).

Pengetahuan tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu sudah dipahami oleh masyarakat.

Mereka mengatakan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan di tingkat pemerintahan kemudian setelah itu di komunikasikan juga kepada Agen dan KPM di setiap desa yang ada Kecamatan Cikijing. Pengetahuan mengenai program BPNT ini juga diungkapkan oleh salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM mengatakan bahwa dirinya mengetahui Program BPNT ini dari pihak pelaksana yang mendampingi setiap kelompok KPM, berikut kutipan wawancaranya:

*“kan ada semacam ketua atau pendamping di desa. Kita didata dari rumah ke rumah. Kita dikasi tau memang, kan ada pemberitahuan dari ketua masing-masing kelompok”.*

(Hasil wawancara dengan (PKM) pada tanggal 19 September 2022).

Pandangan di atas sama halnya dengan yang diungkapkan oleh 5 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT. kesimpulannya menurutnya informasi yang didapatkannya mengenai program BPNT ini dari pendamping BPNT, katanya pendamping tersebut mendatangi KPM untuk memberitahukan tentang Program BPNT. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan:

*“petugasnya langsung datang memberikan informasi kemudian kami juga sesama penerima BPNT saling memberi informasi ketika saldo sudah ada dan siap di belanjakan ke warung yang ditunjuk oleh pemerintah desa”.*

(Hasil wawancara dengan KPM pada tanggal 8 September 2022).

Berdasarkan uraian di atas mengenai Komunikasi Interorganisasional serta dengan KPM mengenai program BPNT yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kecamatan Cikijing, sudah dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan dan Desa, Agen dan KPM sebagai penerima bantuan Sosial. Untuk hal tersebut, Program BPNT sudah diketahui secara menyeluruh dengan komunikasi yang baik oleh semua masyarakat maupun stakeholders pemerintah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Komunikasi dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warung di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka pada awal implementasi program tidak terjadi miskomunikasi antar aktor dari tingkat Kelurahan/Desa maupun Kabupaten. Karena sebelumnya pelaksanaan program dari Kementerian Sosial sudah memberikan sosialisasi yang cukup baik sebagai tujuan dan sasaran dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warung.

Hasil sosialisasi disampaikan kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Cikijing agar masyarakat mengetahui secara rinci isi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warung. Untuk penyampaian sosialisasi pada KPM yang dilakukan di kelurahan/desa dan disampaikan oleh pihak Dinas Sosial dan dibantu oleh para pendamping BPNT. Pada saat sebelum bantuan disalurkan ke semua KPM, dikumpulkan di desa dan dijelaskan secara rinci mengenai bantuan BPNT baik tujuan dari program ini maupun sasaran dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan melalui e-Warung. Tidak hanya itu,



pendamping juga melakukan sosialisasi secara rutin pada saat transaksi program bantuan agar masyarakat paham. Sehingga komunikasi antar organisasi terjalin dengan baik. Berdasarkan wawancara dan observasi serta

penelusuran dokumen, maka diperoleh kesimpulan tentang implementasi komunikasi interorganisasional dari berbagai instansi dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel : .Komunikasi interorganisasional dalam implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka

No.	Nama Instansi/Bagian	Tugas dalam implementasi Program BPNT
1.	Camat	Penanggungjawab BPNT tingkat kecamatan
2.	TKSK	Pendamping BPNT
3.	Kepala Desa	Penanggungjawab BPNT tingkat desa
4.	Pemilik e-warung	Agen Bank BRI yang menyalurkan
5.	KPM (Keluarga Penerima Manfaat)	Masyarakat yang memperoleh BPNT

Sumber : hasil Pengolahan data penelitian, 2022

## 2. Karakteristik Pelaksana

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi-implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cikijing.

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan

menjadi acuan dalam bekerjanya implementor.

Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya



akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Adapun pada proses implementasi penyaluran BPNT di Kecamatan Cikijing, semua pihak ikut serta dalam memantau berjalannya penyaluran tersebut baik dari pihak pemerintah setempat, tim koordinasi tingkat kecamatan maupun dari aparat keamanan. Semua pihak tersebut menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan aturan yang ada dan saling menjalin komunikasi terkait proses penyaluran BPNT di Kecamatan Cikijing.

Seperti halnya yang dikatakan informan pejabat Kecamatan Cikijing selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa semua pihak baik dari pihak pelaksana, pemerintah setempat maupun pihak lainnya yang terkait telah melaksanakan wewenangnya berdasarkan aturan yang telah ada, dengan alasan Camat sebagai Pemerintah yang bertanggung jawab di Kecamatan Cikijing terus memantau proses berjalannya Program yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut kutipan wawancaranya :

*“Saya kira untuk ini sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat, ya untuk bagaimana teknisnya ini, tentunya dia tidak boleh ini keluar dari aturan-aturan yang ada, jadi kalau dia macam-macam ya. Kan Pak Camat sebagai kepala wilayah ya pasti memantau. Baru-baru ini yang ada beredar bahwa ada yang memanfaatkan untuk politik dipanggil semua untuk diklarifikasi, jangan sampai bantuan ini digunakan untuk politik. Jadi kalo sudah dijelaskan dia macam-macam ya pasti berurusan dengan hukum, kemudian selalu bergiliran ada kordinator kepengawasannya itu*

*yang mengawasi jadi kalo ada apa-apa ya dia lapor kepada pihak kecamatan.”*

(Hasil wawancara dengan Seksi Pemb. Masyarakat pada tanggal 10 September 2022).

Penuturan mengenai struktur birokrasi dalam implementasi BPNT ini juga diungkapkan oleh Agen BRI di Desa Cikijing, Ia mengungkapkan bahwa ada sedikit kendala pada struktur birokrasi pelaksana Program BPNT. Dengan alasan bahwa ada sebagian Agen yang kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya dalam pendampingan KPM BPNT pada saat proses penyaluran.

Berikut kutipan wawancaranya dengan Agen pemilik e-warung :

*“Masing-masing desa itu kan harusnya sama kita di e-Warungnya tapi terkadang ada juga masyarakat yang pergi dari kita. Padahal bukan Agen yang dia datangi, yang dia datangi itu disuruh sama kordinator kecamatan pendamping PKH. Maksudnya kan itu pembagian disinikan harusnya itu di e-Warung dia belanja tapi ini malah dia ke kordinator kecamatan itu pendamping padahal dia itu bukan e-Warung, yang kordinator kecamatan itu pendamping PKH. itu juga yang kita keluhkan itu karena dia bukan e-Warung kenapa selalu KPM itu kesana. Kan kita masing-masing desa dan kelurahan sudah punya e-Warung yang direkomendasikan oleh kepala desa”*

(Hasil wawancara dengan e-warung pada tanggal 10 September 2022).

Penjelasan dari Perwakilan pemilik E-Warung yang diwawancarai tersebut, dikuatkan pula oleh TKSK Cikijing dalam proses penyaluran BPNT di Kecamatan Cikijing itu berdasarkan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (PEDUM BPNT) yang dapat dijadikan petunjuk dalam pengambilan tindakan. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Jadi program ini (BPNT) kan sebenarnya sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan, ada pedoman umumnya yang isinya kan jelas untuk petunjuk”.*

(Hasil wawancara dengan TKSK pada tanggal 12 September 2022).

Dilihat dari pernyataan TKSK Cikijing di atas dapat disimpulkan bahwa semua struktur birokrasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila semua pihak pelaksana memahami dengan baik petunjuk yang ada di Pedoman Umum BPNT.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengenai karakteristik pelaksana, struktur birokrasi dalam proses penyaluran BPNT itu dapat disimpulkan bahwa ada sedikit kendala di beberapa desa, yaitu kendala dengan adanya Agen yang melanggar aturan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping KPM. Pendamping tersebut dalam melakukan pendampingan ia mengarahkan KPM untuk mencairkan bantuannya kepada selain Agen yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Desa dan Pihak BRI, ini membuktikan bahwa pendamping tersebut telah melanggar aturan yang ada dan tidak mengikuti apa yang tercantum pada Pedoman Umum BPNT.

Karakteristik agen pelaksana berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, yaitu karakteristik yang ada pada aktor pelaksana di kelurahan/desa dimana aktor pelaksana yang tegas,

disiplin, baik dan ramah kepada setiap masyarakat. Untuk karakteristik yang ideal dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cikijing Kabuapten Majalengka.

Hasilnya adalah para aktor pelaksana mulai dari desa, Pendamping, Koordinator dan pemilik agen E-Warung sudah memenuhi standar yaitu masing-masing aktor memiliki sifat pelayanan publik yang berperilaku santun dan ramah kepada masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat.

### **3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (ekosospol). Pengaruh faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana Program BPNT di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik ini sebenarnya menunjuk kondisi atau keadaan lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini menilai sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public terutama dalam pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai. Lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Sekalipun dampak dari sistem-sistem ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, sistem-sistem ini mungkin mempunyai efek mendalam terhadap pencapaian badan pelaksana. Peneliti

melakukan wawancara dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cikijing, beliau mengatakan :

*“Pasti kondisi sosial dan ekonomi serta politik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program BPNT melalui E-Warung. Karena tingkat kemiskinan serta rendahnya pendidikan masyarakat berdampak terhadap pengetahuan kebijakan BPNT melalui E-Warung. Maka dari itu kita sebagai pelaksana kebijakan berusaha menangani permasalahan ini. Tindakan yang sudah dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan BPNT yg disalurkan melalui E-Warung ini. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat penerima bantuan benar-benar paham terhadap mekanisme pengambilan bantuan secara non tunai yang dilakukan di E-Warung. Tetapi kegiatan sosialisasi ini belum kita lakukan secara rutin. Saya tidak mengetahui aturan berapakah sosialisasi ini harus dilakukan apalagi selama corona bantuan sangat banyak macamnya jadi perlu kehati-hatian dalam penyaluran bantuan tersebut”.* (Hasil wawancara dengan Kasi PM pada tanggal 12 September 2022).

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Kecamatan Cikijing dalam upaya mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warung sudah berusaha melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut. Kegiatan sosialisasi ini sangat perlu

dilakukan guna mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dan bagaimana solusinya, sehingga kebijakan tersebut akan optimal. Namun pelaksanaan sosialisasi ini belum dilakukan secara optimal oleh agen pelaksana kebijakan.

Berdasarkan keterangan tersebut maka penulis mengategorikan bahwa pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cikijing belum optimal. Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warung dalam pelaksanaannya mengenai kebijakan tersebut belum optimal.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih belum paham dalam mekanisme cara pengambilan bantuan secara non tunai yang dilakukan di E-Warung kemudian banyaknya jenis bantuan selama pandemic Covid-19. Hal ini harus menjadi perhatian untuk agen pelaksana guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warung) di Kecamatan Cikijing.

Secara Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Jika dilihat dari segi sosial masyarakat sangat merespon adanya program BPNT, mereka sangat mendukung dengan adanya program ini. Hal itu dapat dilihat dari respon masyarakat setempat yang tidak mendapatkan program juga ikut membantu dalam proses pengadaan barang di E-Warung.

Masyarakat ikut membantu mengangkat dan menata barang-barang yang dibeli oleh para pihak pelaksana. Hanya saja karena keadaan masyarakat masih banyak yang berpendidikan rendah dan lansia sehingga tidak dapat menggunakan ATM/kartu combo. Hal ini

menjadi hambatan dalam pelaksanaannya sebab program ini menggunakan ATM/kartu kombo sebagai alat transaksi penyalurannya. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan program Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT) melalui E-Warung di Kecamatan Cikijing adalah salah satu tujuan yaitu meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan pangan bagi KPM belum terlaksana karena ada masalah yang terjadi pada mesin EDC sehingga menyebabkan pada salah satu tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak terealisasi yaitu meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. karena dengan terjadinya masalah pada mesin EDC menyebabkan ketidak efektifan penyaluran.

#### **4. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Karena itu, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Maksimal atau tidaknya sebuah kebijakan implementasi itu juga ditentukan oleh sikap pelaksana dan pemerintah setempat, adanya sebuah dukungan yang diberikan oleh pemerintah ataupun tingkat kemauan yang tinggi yang dimiliki oleh pihak pelaksana itu akan membantu memaksimalkan proses berjalannya sebuah implementasi.

Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat dibutuhkan pelayanan yang baik dan sikap yang ramah dari pihak pelaksana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal ini adalah masyarakat miskin yang menjadi peserta dalam program BPNT. Untuk sebuah program bantuan sosial, masyarakat tentunya akan

mengadukan keluhan ataupun kendalanya kepada kepada pihak pelaksana dan pemerintah setempat agar dicarikan solusi kepada mereka.

Kecamatan Cikijing merupakan kecamatan di Kabupaten Majalengka yang merupakan salah satu pelaksan Program BPNT dengan jumlah KPM sebanyak 4579 orang. Dengan jumlah KPM yang banyak tentunya dibutuhkan tingkat kemauan yang tinggi pula dari pihak pelaksana dalam melayani masyarakat tentang bagaimana sikap pemerintah dan pelaksana dalam proses penyaluran BPNT di Kecamatan Cikijing. Pemerintah setempat dan pihak pelaksana dalam implementasi program ini harus memberikan dukungan dan memberikan pelayanan baik.

Berikut koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah setempat dan para pelaksana yang turut memantau proses penyaluran BPNT tersebut.

Hal tersebut terungkap dari informan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cikijing, berikut kutipan wawancaranya:

*“Dulukan bukan berupa bantuan pangan, dulukan masih Rastra jadi transaksi pembayarannya itu disini dulu, tapi sekarang sudah berubah Pangan masing-masing ada warung tiap kelurahan dan desa. jadi kita cuma kadang turun mengontrol apakah sudah tersalurkan.*

*Jadi setiap yang dibutuhkan itu dalam hal penyaluran atau apakah itu misalnya selalu dipersiapkan ada. Kalau dia mau adakan pertemuan, ada aula dibelakang. Ada e-Warung disitu ada badan koordinator, ada lurah/kepala desanya, semua yang mereka butuhkan kita ladeni, sarana dan prasarananya*

*itu kita siapkan, apakah itu sosialisasi atau yang lainnya.”*

(Hasil wawancara dengan Kasi PM pada tanggal 9 September 2022).

Diungkapkan juga oleh TKSK Cikijing, Menurutnya Pemerintah kecamatan dan Tim Kordinasi Bansos tingkat kecamatan berfungsi sebagai tim koordinasi di tingkat kecamatan dan sebagai Social Control dalam penyaluran bantuan sosial dan semua aktivitas yang dapat menunjang berjalannya penyaluran bantuan sosial. Berikut kutipan wawancaranya :

*“Iya jadi di Kecamatan itu berfungsi sebagai Tim Koordniasi, selain sebagai Tim Koordinasi di kecamatan dia juga berfungsi sebagai Social Control yah Social Control dalam penyaluran bantuan, artinya setiap kecamatan itu kalau kita pertama itukan sudah membantu kita dalam hal verifikasi, dalam hal penyaluran KKS, dalam hal menginstruksikan kepada menyesuaikan kepada TIKOR tingkat desa bahwa hari ini ada penyaluran hari ini jurusan ini dan sebagainya.*

*Inilah bahagian dari kerja-kerja kecamatan dalam membantu mengatur, begitupun kelurahan dan desa sebenarnya hampir sama yang dikerjakan di desakelurahan juga, mereka mengkonfirmasi kepada semua aparatnya, kepala lingkungannya, tetapi yang paling bagus adalah pelaksanaan di tingkat dusun/lingkungan karena kalau di tingkat dusun/lingkungan agak kecil sedikit dan bisa langsung didapat responnya”.*

(Hasil wawancara dengan Kasi PM pada tanggal 9 September 2022).

Mengenai disposisi, pandangan di atas sama halnya dengan yang diungkapkan oleh salah Kepala Desa Bagjasari, Menurutnya dukungan dari pemerintah desa itu sudah diberikan kepada masyarakat karena pemerintah desa lebih tau kondisi masyarakatnya dibanding dengan para Agen. Berikut kutipan wawancaranya :

*“Agen yang menangani ini tapi pemerintah membantu seperti saya, sayakan pemerintah desa saya mendampingi supaya kalau ada masalah bisa dikasi solusi, yang menerima itu adalah masyarakat kita. Agenkan tidak kenal dengan masyarakat mereka bukan orang-orang dari pemerintah jadi tidak kenal bahwa ini benar masyarakat dari desa ini.”*

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 12 September 2022).

Pandangan mengenai disposisi/dukungan dari pelaksana tidak hanya di ungkapkan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan TKSK Cikijing tapi juga diungkapkan oleh salah satu Agen.

Menurutnya dukungan untuk pemerintah setempat itu sudah ada setiap proses penyaluran dan bentuk dukungannya itu seperti ikut meninjau dilapangan pada saat proses penyaluran BPNT. Berikut kutipan wawancaranya :

*“Untuk aparat desa disetiap ada pembagian pasti aparat desa juga turun meninjau disetiap penyaluran. Disini juga ada sebagai pihak keamanan yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas, semua aman-aman saja disini, semua ikut antri.”*



(Hasil wawancara dengan Agen pada tanggal 12 September 2022).

Berdasarkan pandangan dari pihak pelaksana dan Pemerintah setempat di atas itu menunjukkan bahwa dukungan ataupun sikap dari pelaksana dan pemerintah sudah direalisasikan dengan baik pada saat penyaluran BPNT, dalam bentuk pemantauan, memberikan sarana sosialisasi maupun memberikan keamanan kepada KPM. Menurutnya pemerintah juga ikut turun memantau pada saat penyaluran BPNT. Berikut kutipan wawancaranya :

*“Pak Kepala desa/Kuwu sebagai pemerintah setempat selalu datang untuk memastikan masyarakatnya mendapat bantuan yang terdaftar sebagai penerima bantuan”.*

(Hasil wawancara dengan KPM pada tanggal 12 September 2022).

Mencermati gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan ataupun sikap dari pihak pelaksana dan pemerintah setempat sudah direalisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dukungan dari Pelaksana ataupun Pemerintah itu sudah dirasakan oleh KPM yang ada di Kecamatan Cikijing. Dalam proses penyaluran BPNT semua pihak ikut serta dalam memantau berjalannya proses penyaluran tersebut, tidak hanya dari Tim Koordniasi Bansos dan Pemerintah setempat saja tetapi juga dari TNI-AD dalam hal ini adalah Babinsa dan juga dari pihak Kepolisian yakni Bhabinkamtibmas, semua pihak tersebut itu menunjukkan bahwa mereka membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Kecenderungan para pelaksana yang terlibat dalam program ini khususnya di Kecamatan Cikijing sudah

menjalankan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Hanya saja terdapat beberapa pelaksana yang tidak ramah dalam melayani masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tidak nyaman atas sikap pelaksana tersebut. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya. Justru yang dilakukan salah satu implementor adalah hal yang menyimpang. Hal ini tidak dapat melakukan salah satu poin pada disposisi implementor respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Implementor yang lain juga bersikap tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Sehingga masalah yang terjadi pada mesin EDC menjadi keluhan masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN**

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah *Non Cash Food Assistance Program*. BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.

BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan



dari siapapun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2022 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Untuk melihat Implementasi Program BPNT disalurkan kepada KPM di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, maka peneliti mengangkat beberapa indikator menurut Meter dan Horn (Nugroho, 2009) yaitu Komunikasi Interorganisasional, Karakteristik Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik serta Disposisi atau Sikap Pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut :

### **1. Komunikasi Interorganisasional**

Menurut Edward III dalam Agustino (2008) komunikasi adalah suatu yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan/program. Dalam hal program bantuan sosial, komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan bantuan sosial tersebut dikomunikasikan pada organisasi publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan bantuan social disusun. Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian transmisi atau informasi, konsistensi informasi yang di sampaikan serta kejelasan informasi tersebut.

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-

individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Komunikasi Interorganisasional Program BPNT yang dilakukan oleh Tim Kordinasi Bantuan Sosial Kecamatan Cikijing, sudah dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan dan Desa, Agen dan KPM sebagai penerima bantuan Sosial.

Untuk hal tersebut, Program BPNT sudah diketahui secara menyeluruh dengan komunikasi yang baik oleh semua masyarakat maupun stakeholders pemerintah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

### **2. Karakteristik Pelaksana**

Pelaksana yaitu menunjukkan pada setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan atau program. Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara konsisten dan jelas, akan tetapi implementor atau pelaksana kekurangan sumber daya untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program agar efektif,

yakni tanpa adanya sumber daya maka program atau kebijakan hanya sebatas kertas dokumen. Edward III (Agustino, 2008) mengemukakan bahwa hal ini terdapat 4 (empat) komponen, yaitu staf, informasi dalam implementasi kebijakan, wewenang dan fasilitas.

Mengenai karakteristik pelaksana, dalam proses penyaluran BPNT itu dapat disimpulkan bahwa ada sedikit kendala di beberapa desa, yaitu kendala dengan adanya Agen yang melanggar aturan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping KPM. Pendamping tersebut dalam melakukan pendampingan ia mengarahkan KPM untuk mencairkan bantuannya kepada selain Agen yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Desa dan Pihak BRI, ini membuktikan bahwa pendamping tersebut telah melanggar aturan yang ada dan tidak mengikuti apa yang tercantum pada Pedoman Umum BPNT.

### 3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (ekosospol). Pengaruh faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Akib, 2012).

Secara Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Jika dilihat dari

segi sosial masyarakat sangat merespon adanya program BPNT, mereka sangat mendukung dengan adanya program ini. Hal itu dapat dilihat dari respon masyarakat setempat yang tidak mendapatkan program juga ikut membantu dalam proses pengadaan barang di E-Warung. Masyarakat ikut membantu mengangkat dan menata barang-barang yang dibeli oleh para pihak pelaksana. Hanya saja karena keadaan masyarakat masih banyak yang berpendidikan rendah dan lansia sehingga tidak dapat menggunakan ATM/kartu combo. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaannya sebab program ini menggunakan ATM/kartu kombo sebagai alat transaksi penyalurannya. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan program Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT) melalui E-Warung di Kecamatan Cikijing adalah salah satu tujuan yaitu meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan pangan bagi KPM belum terlaksana karena ada masalah yang terjadi pada mesin EDC sehingga menyebabkan pada salah satu tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak terealisasi yaitu meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. karena dengan terjadinya masalah pada mesin EDC menyebabkan ketidak efektifan penyaluran.

### 4. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana dari program, terutama dalam hal aparatur birokrasi. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik

seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif Edward III (Agustino,2008).

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis di mana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksanaan dalam implementasi kebijakan yaitu pemahaman, respon pelaksana terhadap implementasi dan intensitas dari respon pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Cikijing disimpulkan bahwa dukungan ataupun sikap dari pihak pelaksana dan pemerintah setempat sudah direalisasikan dengan baik kepada masyarakat. Dukungan dari Pelaksana ataupun Pemerintah itu sudah dirasakan oleh KPM yang ada di Kecamatan Cikijing. Dalam proses penyaluran BPNT semua pihak ikut serta dalam memantau berjalannya proses penyaluran tersebut, tidak hanya dari Tim Koordniasi Bansos dan Pemerintah setempat saja tetapi juga dari pihak lainnya, misalnya Kepolisian yakni dengan Babinkabtibmas.

Semua pihak tersebut itu menunjukkan bahwa mereka membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai topik permasalahan dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana yang telah dijabarkan dan dijelaskan mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) di Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara Komunikasi Interorganisasional; yaitu koordinasi dan komunikasi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warung di Kecamatan Cikijing dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping kepada kelompok sasaran. Sehingga komunikasi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di semua pihak sudah berjalan dengan baik.

2. Karakteristik Pelaksana; Karakteristik pelaksana dalam proses implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warung) di Kecamatan Cikijing sudah optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima bantuan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan belum ramah dan masih harus diperbaiki.

3. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Karena keadaan sosial, ekonomi dan politik dapat mendukung bahkan sebaliknya.

Di Kecamatan Cikijing keadaan sosialnya masih bisa dikatakan belum baik karena masih terdapat beberapa warga yang mengalami buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warung mengalami kesulitan. Untuk keadaan ekonomi

masayarakat masih bisa dikatakan stabil dan keadaan politik di juga tidak mengalami masalah.

4. Disposisi atau sikap pelaksana implementor bahwa pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya. Justru yang dilakukan salah satu implementor adalah hal yang menyimpang.

Hal ini tidak dapat melakukan salah satu poin pada disposisi implementor respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Implementor yang lain juga bersikap tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Sehingga masalah yang terjadi pada mesin EDC menjadi keluhan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2009). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Dini, A. R, Nurmalisa, Y, & Halim. A (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5 (13).
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hakim, D. B., Harianto, H & Nurmalina, R (2019). Analisis Dampak Kebijakan Beras Sejahtera dan Kebijakan Program Bantuan Non Tunai Terhadap Titik Ekuilibrium Rumah Tangga Miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3 (4), 799-808.
- Islamy, M. I. (2002). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Sosial RI. 2018. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*.
- Mazmanian, D. A & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Nugroho D, R. (2009). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parawangi, Anwar. (2011). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone)*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rahman. B, & Agustian. A (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai

- (BPNT). Analisis Kebijakan Pertanian, 16 (1), 1-18.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta.
- Suharto. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Winter, Soren C, (2004). Implementation Perspectives: Statue and Reconsideration. Dalam Peters, B Guy and Pierre, Jon, 2003. Handbook of Public Administration. London: Sage Publications Ltd.
- Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(2), 138-152.

**Dokumen :**

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Wahab, A, S. (2008). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Permensos No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.